

Kontribusi fiskal daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah

Zulianissa Diah Kusmawati*, Naila Tamaamil Atsnaa, Umi Masruroh, Puji Astuti, Lucia Rita Indrawati, Syifa urrahmah

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: syifaurrrahmah@untidar.ac.id)

Abstract

The main problem of this study lies in how fiscal contributions through local taxes, transfers, and expenditures can genuinely enhance community welfare. In fact, the effectiveness of public fund utilization has not been optimal, resulting in a less-than-maximum impact on human development. This study aims to analyze the contribution of regional fiscal policy to improving community welfare in Central Java Province during the 2021–2023 period. The Human Development Index (HDI) is used as an indicator of welfare, focusing on the effects of regional taxes, intergovernmental transfers, and regional expenditures. A quantitative approach is employed using panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM). The results show that simultaneously, all three independent variables have a significant effect on the HDI. However, partially, only regional taxes and regional expenditures significantly influence the HDI, while intergovernmental transfers do not have a significant effect. These findings indicate that the effectiveness of public fund utilization has not yet been optimal in supporting human development. Therefore, more targeted fiscal management is needed to ensure that fiscal outcomes have a real impact on community welfare.

Keywords: HDI, Local Taxes, Regional Transfer Revenue, Regional Expenditure.

Abstrak

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana kontribusi fiskal melalui pajak daerah, transfer, dan belanja dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktanya, efektivitas penggunaan dana publik masih belum optimal sehingga dampaknya terhadap pembangunan manusia belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi fiskal daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator kesejahteraan, dengan fokus pada pengaruh pajak daerah, pendapatan transfer daerah, dan belanja daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IPM. Namun, secara parsial hanya pajak daerah dan belanja daerah yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sementara, pendapatan transfer daerah justru tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas penggunaan dana publik belum optimal dalam mendukung pembangunan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan fiskal yang lebih tepat sasaran agar hasil fiskal mampu berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: IPM, Pajak Daerah, Pendapatan Transfer Daerah, Belanja Daerah.

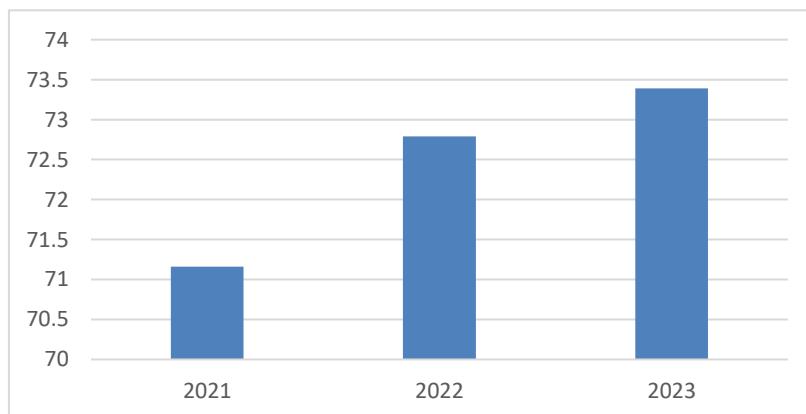
How to cite: Kusmawati, Z. D., Atsnaa, N. T., Masruroh, U., Astuti, P., Indrawati, L. R., & Rahmah, S. (2025). Kontribusi fiskal daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 653–665. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.2016>



1. Pendahuluan

Pembangunan daerah tidak lepas dari peran fiskal sebagai jembatan menuju perbaikan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu yang menggambarkan kualitas hidup yang lebih baik itu dengan terpenuhinya kebutuhan, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah (Prastiwi & Handayani, 2021). Peningkatan kualitas hidup manusia bisa dilihat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan alat ukur untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Ini dilihat dari beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. IPM menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah (Alfattah et al., 2024). Menurut Badan Pusat Statistik, (2024), IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata 0,70 persen.

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa, IPM Provinsi Jawa Tengah meunjukkan tren positif dalam peningkatan IPM selama periode 2021-2023, dengan kenaikan dari 71,16% pada tahun 2021 menjadi 73,39% ada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, meskipun masih terdapat disparitas antarwilayah serta tantangan dalam memastikan efektivitas kebijakan fiskal daerah (Wahyuntari & Pujiati, 2016). Kontribusi fiskal melalui pajak daerah, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan belanja daerah seharusnya menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan manusia. Namun, efektivitas instrumen fiskal tersebut sering kali dipertanyakan, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal.



Gambar 1. IPM Jawa Tengah Tahun 2021-2023

Penelitian terdahulu mengenai kontribusi fiskal daerah terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil yang belum konsisten. Saragih (2018) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan peenlitian Samudro (2024) justru menemukam pengaruh negatif signifikan. Perbedaan hasil juga tampak pada variabel pendapatan transfer. Saswatata dan Parju (2022) serta Bediona dan Subarjo (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sementara Putro (2022) dan Putra (2024) menemukan bahwa DAU justru berpengaruh negatif karena lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai, dibandingkan alokasi produktif. Hal serupa juga terjadi pada variabel belanja daerah, dimana Loeis

dan Setiawana (2020), Rosmadayati et al. (2021), dan Simarmata dan Iskandar (2022) menemukan pengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan Sutono (2022) menemukan tidak ada pengaruh signifikan akibat dominasi belanja rutin.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian mengenai kontribusi fiskal daerah di Jawa Tengah dengan data terbaru periode pasca pandemi (2021–2023) menjadi sangat relevan. Hal ini karena pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap struktur penerimaan dan belanja daerah, sehingga efektivitas kebijakan fiskal pasca krisis perlu dievaluasi kembali. Pemilihan Jawa Tengah didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap, perannya sebagai provinsi berpenduduk besar dengan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, serta dinamika fiskalnya yang menarik untuk dikaji (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana pajak daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui IPM. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah daerah, sehingga alokasi pajak, transfer, dan belanja dapat benar-benar mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

2. Tinjauan Pustaka

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Ummah (2024) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan kualitas hidup manusia. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang merupakan program dari PBB pada tahun 1990, dimana indeks yang ditekankan adalah pembangunan manusia dan sumber daya yang ada. Indeks ini diukur dari beberapa dimensi utama Alfattah et al. (2024) yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup.
2. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah.
3. Standar hidup yang layak diukur dengan pendapatan per kapita yang disesuaikan.

Badan Pusat Statistik (2024) Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan IPM yang cukup konsisten sejak 2010, meskipun mengalami berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang sempat memperlambat laju pertumbuhan tersebut. Namun, Provinsi Jawa Tengah tetap mencatat peningkatan IPM dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun pertumbuhannya relatif kecil (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023). Angka IPM sendiri mencerminkan tingkat keberhasilan suatu daerah dalam mencapai target pembangunan; semakin tinggi IPM, semakin dekat daerah tersebut dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan (Alfattah et al, 2024). Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori pertumbuhan endogen, manusia dipandang sebagai faktor utama yang bersifat endogen dalam proses pertumbuhan ekonomi, sekaligus sebagai modal penggerak utamanya (Sari et al, 2024).

Pajak Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang memainkan peran sentral dalam pembiayaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut teori fiskal klasik yang dikemukakan oleh Musgrave & Musgrave (1989), kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Di tingkat pemerintahan daerah, pajak digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber daya secara merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat otonomi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dalam konteks Indonesia, pajak daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan pajak daerah sebagai elemen kunci dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran daerah berdasarkan prioritas pembangunan masing-masing wilayah.

Pajak daerah merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal pemerintah daerah. Semakin tinggi pajak, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, khususnya yang berdampak langsung pada dimensi utama IPM: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (Sari et al., 2024). Mereka menekankan bahwa daerah yang mampu mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah cenderung lebih baik dalam menyediakan layanan dasar yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pendapatan Transfer Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan transfer merupakan salah satu komponen utama dalam pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, terdiri dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), Dana Otonomi Khusus, serta Dana Insentif Daerah. Transfer ini bertujuan untuk membantu pemerataan fiskal antar daerah serta mendukung pelayanan publik dasar. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.07/2021, pendapatan transfer digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang berkorelasi langsung dengan indikator pembangunan manusia.

Sejalan dengan itu, teori Peacock & Wiseman (1961) menjelaskan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah tidak terjadi secara konstan, tetapi mengalami peningkatan secara bertahap yang dipengaruhi oleh kejadian luar biasa seperti perang, krisis ekonomi, atau bencana alam. Teori ini menekankan tiga konsep utama. Pertama, *displacement effect* (efek pemindahan) menjelaskan bahwa ketika terjadi krisis besar, pemerintah ter dorong meningkatkan pengeluaran publik dan, untuk membiayainya, menaikkan pajak. Dalam situasi darurat, masyarakat cenderung lebih menerima beban pajak yang lebih tinggi karena memahami urgensi kondisi tersebut. Kedua, *inspection effect* (efek pemeriksaan) menggambarkan bahwa setelah krisis mereda, masyarakat menjadi lebih sadar sekaligus lebih menerima perlunya pajak yang relatif tinggi untuk mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik. Ketiga, *concentration effect* (efek konsentrasi) menunjukkan bahwa pemerintah cenderung memperluas peran dan

tanggung jawabnya pascakrisis, sehingga mendorong peningkatan yang lebih permanen pada pengeluaran publik dan penerimaan pajak.

Penelitian Suhyanto et al. (2020) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Hal ini menandakan bahwa kombinasi antara pendapatan transfer dan kemandirian fiskal daerah dapat meningkatkan pembangunan manusia secara agregat. Hasil serupa diperoleh oleh Agus (2020) dalam skala nasional, yang menunjukkan bahwa DAU, DAK, DBH, dan PAD semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun melalui belanja modal sebagai variabel perantara. Namun demikian, tidak semua hasil studi menunjukkan pengaruh positif. Dalam studi di Provinsi Bali ditemukan bahwa DAK justru memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IPM, sementara PAD, DAU, dan DBH tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Williantara & Budiasih, 2016). Sementara itu, Arispren et al. (2021) yang meneliti Aceh menemukan bahwa Dana Otonomi Khusus (DOKA) berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan PAD memberikan kontribusi positif yang signifikan.

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Transfer Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Widowati dan Fatimah (2022), belanja daerah merupakan seluruh kas keluaran yang harus disebutkan dengan berkurangnya nilai kekayaan pada periode tertentu. Belanja daerah dikhususkan untuk dapat membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan ini bisa berupa peningkatan standar hidup, kesehatan, bahkan pendidikan. Belanja daerah memiliki struktur yaitu belanja langsung dan tidak langsung. Belanja daerah langsung terdiri dari belanja pegawai, barang jasa, dan modal. Sedangkan untuk belanja daerah tidak langsung terdiri dari belanja pegawai tidak langsung, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

Belanja daerah atau APBD memiliki peranan yang cukup penting dapat peningkatan IPM. Walaupun peningkatan ini tidak terjadi dalam semua bidang perbelanjaan, bisa dalam bidang pendidikan maupun kesehatan di Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah yang menyatakan bahwa pengalokasian anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prastiwi & Handayani, 2021).

H3: Terdapat pengaruh signifikan antara Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kontribusi fiskal daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2023. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif

bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2017). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari instansi resmi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan secara terbuka.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah total populasi dan sampel adalah 35 daerah otonom, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Pengamatan 2021 hingga 2023 dipilih karena merupakan data terbaru yang tersedia lengkap di level kabupaten/kota Jawa Tengah. Tahun 2021 juga menjadi awal fase pemulihan pasca pandemi COVID-19 sehingga penting untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal mendukung kesejahteraan masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak *EViews*. Regresi data panel dipilih karena mampu menggabungkan data *time series* (tahun 2021–2023) dan *cross section* (kabupaten/kota di Jawa Tengah), sehingga dapat memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variabel yang lebih kompleks dan akurat dibandingkan regresi biasa. Adapun bentuk umum model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IPM_{it} = & \beta_0 + \beta_1(Pajak\ Daerah)_{it} + \beta_2(Pendapatan\ Transfer\ Daerah)_{it} \\ & + \beta_3(Belanja\ Daerah)_{it} + \epsilon_{it} \end{aligned}$$

Dalam model ini, β_0 merupakan konstanta (intersep), sedangkan β_1 , β_2 , dan β_3 adalah koefisien regresi, adapun residual di notasikan ϵ_{it}

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Hasil Uji Pemilihan Model

Hasil uji Chow dan Hausman pada Tabel 1 menunjukkan nilai Prob. = 0,0000 untuk masing-masing uji. Temuan ini mengindikasikan bahwa Fixed Effects Model (FEM) lebih sesuai dibandingkan Pooled Least Squares (Common Effect Model), serta lebih tepat dibandingkan Random Effects Model (REM). Dengan demikian, FEM dipilih sebagai model estimasi utama dalam penelitian ini.

Tabel 1. Chow Test and Hausman Test for Model Preferences

	F Statistik / Chi-square	P value
Chow Test	184,85	(0,0000)
Hausman Test	15,039	(0,0000)

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan Tabel 2, korelasi antar variabel independen menunjukkan nilai yang rendah. Korelasi tertinggi terjadi antara Pajak Daerah dan Belanja Daerah (0,188), disusul Pendapatan Transfer dan Belanja Daerah (0,176). Seluruh koefisien korelasi

berada jauh di bawah batas umum 0,80, sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

Tabel 2. Matriks Korelasi Antar Variabel Independen

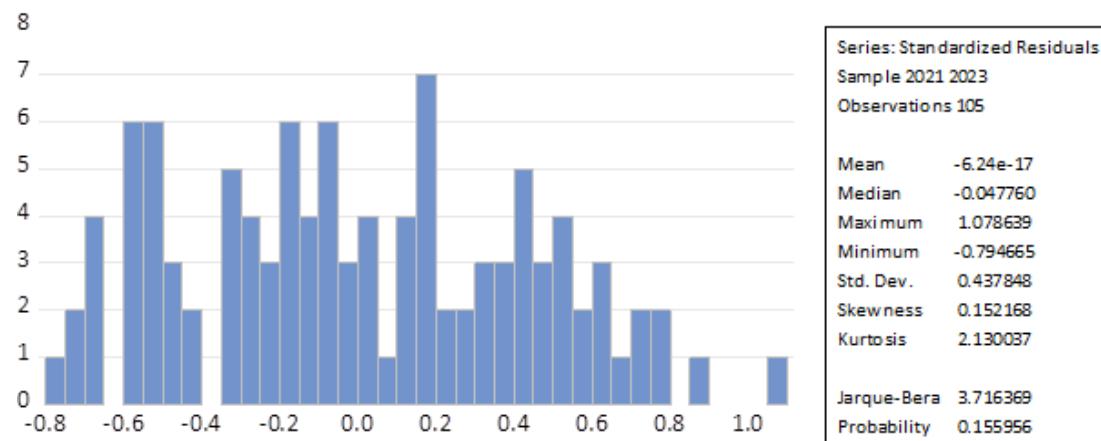
Variabel	Pajak_Daerah	Pendapatan_Transfer	Belanja_Daerah
Pajak Daerah	1,000	0,033	0,188
Pendapatan_Transfer	0,033	1,000	0,176
Belanja Daerah	0,188	0,176	1,000

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai p-value > 0,05, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Std. Eror	t statistic	P value
Intercept	0,304311	0,465075	0,654326	0,5151
Pajak Daerah	-4,54E-11	2,33E-11	-1,953177	0,0550
Pendapatan Transfer Daerah	-1,81E-11	1,58E-11	-1,145482	0,2561
Belanja Daerah	4,87E-11	2,00E-10	0,242931	0,8088

Berdasarkan Gambar 3, nilai Prob. Jarque–Bera > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.



Gambar 3. Uji Normalitas

Hasil Regresi Data Panel

Tujuan dilakukannya estimasi data panel untuk memastikan model yang digunakan telah memenuhi goodness of fit. Oleh karena itu, dilakukanlah pemilihan model terbaik dan pendekstrian adanya penyimpangan terhadap asumsi klasik dalam model. Setelah dilakukan tahapan-tahapan tersebut, terpilihlah Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik dalam penelitian ini. Hasil dari estimasi regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagaimana Tabel 4.

Hasil olah data memperoleh nilai F-statistic sebesar 0,0000 kurang dari 0,05. Ini artinya, variabel pajak daerah, pendapatan transfer daerah, dan belanja daerah yang diestimasi melalui model FEM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Secara parsial, nilai probabilitas pajak daerah sebesar $0,0440 < \alpha (0,05)$, maka menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan nilai koefisien $-1,12E-10$, artinya variabel pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Variabel pendapatan transfer daerah memiliki nilai probabilitas $0,1513 > \alpha (0,05)$, maka

menerima H_0 dan menolak H_a , maka variabel pendapatan transfer daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Variabel belanja daerah menunjukkan nilai probabilitas $0,0440 < \alpha (0,05)$, maka menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan nilai koefisien sebesar $2,75E-09$, sehingga variabel belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Adjusted R-Squared dari pengujian diatas menunjukkan nilai sebesar 0,684, artinya variabel pajak daerah, pendapatan transfer daerah, dan belanja daerah mempengaruhi indeks pembangunan manusia sebesar 68,4%, sisanya sebesar 31,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)

Variabel	Koefisien	Std. Eror	t-Statistik	P-Value
Pajak_Daerah	-1,12E-10	5,45E-11	-2,052836	0,0440**
Pendapatan_Transfer_Daerah	-5,38E-11	3,71E-11	-1,451460	0,1513
Belanja_Daerah	2,75E-09	4,70E-10	5,855276	0,0000***
Intercept	67,26723	1,090121	61,70620	0,0000***
R ²	0,687	F-statistik		0,000***
Adjusted R ²	0,684			

Keterangan: diolah menggunakan pemrograman E-Views; (2025). Nilai p-value ditampilkan untuk setiap estimasi statistik. Tingkat signifikansi: *** untuk $p < 0,01$; ** untuk $p < 0,05$; dan * untuk $p < 0,10$.

4.2. Pembahasan

Kontribusi Pajak Daerah dengan IPM

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan FEM, didapat hasil bahwa pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan sesuai dengan teori Peacock dan Wisman yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki batas toleransi terhadap pajak, yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat menerima besarnya pajak yang diperlukan oleh pemerintah untuk menutupi kebutuhan pembiayaan pengeluaran pemerintah (Ningrum & Nuryadin, 2021). Kondisi di mana pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena pajak yang tinggi mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat menurun (Umobong, 2024). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Vigesandiran & Selvarasa (2018), Asawasakulkrai (2022), dan Samudro (2024).

Penelitian Vigesandiran dan Selvarasa (2018) menunjukkan bahwa penerimaan pajak pemerintah memiliki dampak negatif signifikan secara statistik terhadap IPM dalam jangka panjang di Sri Lanka. Sementara itu, penelitian Asawasakulkrai (2022) yang menganalisis mengenai penerimaan pajak dan dampak redistribusinya terhadap ketimpangan dan pembangunan manusia di berbagai lintas negara, dihasilkan progresivitas pajak penghasilan pribadi dan ketergantungan pada pajak berbasis konsumsi memiliki hasil yang tidak diinginkan yang memperburuk ketimpangan pendapatan, sehingga menurunkan kesejahteraan. Kemudian Samudro (2024) menjelaskan hubungan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ditemukan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dapat disebabkan oleh masih dominannya ketergantungan pemerintah daerah pada pendapatan transfer dibandingkan optimalisasi pajak asli daerah. Ketergantungan ini berpotensi menghambat kemampuan daerah dalam membiayai

layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen utama dalam peningkatan IPM dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Saragih (2018), di mana penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Kontribusi Pendapatan Transfer ke Daerah dengan IPM

Berdasarkan hasil regresi panel dengan metode FEM, variabel Pendapatan Transfer Daerah menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, peningkatan pendapatan transfer daerah secara statistik justru diikuti oleh penurunan IPM, yang menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara keduanya. Hal ini mencerminkan bahwa hipotesis nol diterima, yakni tidak terdapat pengaruh signifikan dari pendapatan transfer terhadap IPM. Hasil ini bertentangan dengan gagasan UNDP (1990) yang menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan dasar seperti hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan memiliki standar hidup yang layak. Oleh karena itu, daerah dengan pendapatan tinggi seharusnya mampu mendorong peningkatan IPM melalui alokasi anggaran yang tepat.

Hasil juga bertentangan dengan penelitian Parju & Srasa (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian Putro (2022) menyatakan bahwa Pendapatan daerah (Dana Alokasi Umum) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini karena menurut Putra (2024) pada dasarnya DAU lebih banyak digunakan untuk belanja umum pegawai bukan untuk infrastruktur dan fasilitas umum. Sehingga peningkatan DAU justru menyebabkan penurunan IPM. Sementara, penelitian Bediona dan Subarjo (2022) juga mengatakan bahwa pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM karena rata-rata PAD di provinsi NTT relatif kecil dibanding rata-rata dana perimbangannya.

Kontribusi Belanja Daerah dengan IPM

Dari hasil regresi data panel dengan FEM dapat dilihat bahwa, belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Hasil ini mencerminkan bahwa hipotesis nol ditolak dan selaras dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Lin (1994) dan teori pembangunan ekonomi endogen yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sejalan dengan peningkatan pembangunan manusia (Sasongko & Wibowo, 2022). Kondisi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah efektif (Astuti & Mispiyanti, 2019). Menurut Ezkirianto dan Alexandi (2013), keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangat bergantung pada peran strategis pemerintah dalam merencanakan dan mengelola belanja secara efektif dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti yang ditemukan oleh

Loeis dan Setiawana (2020) di Bali, Rosmadayati et al. (2021) di Jawa Timur, dan Simarmata dan Iskandar (2022) secara nasional. Peningkatan belanja, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, dinilai mampu mendorong kualitas pembangunan manusia. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Halim dan Rahayu (2022) di 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah menurut fungsi pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Hal ini karena Indikator pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap peningkatan IPM tidak dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek.

5. Kesimpulan

Hasil analisis regresi panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM), dapat disimpulkan bahwa kontribusi fiskal daerah yang terdiri dari pajak daerah, pendapatan transfer daerah, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. Pajak daerah secara parsial menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap IPM, mengindikasikan bahwa beban pajak yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan transfer daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan transfer belum optimal dalam meningkatkan IPM, kemungkinan karena alokasinya tidak fokus pada sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Belanja daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM, memperkuat pentingnya alokasi anggaran pemerintah daerah yang efektif dan produktif dalam mendukung pembangunan manusia. Secara keseluruhan, fiskal daerah berperan penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat, dengan efektivitas belanja sebagai faktor paling dominan dalam mendorong peningkatan IPM.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada dosen mata kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Universitas Tidar yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi yang relevan, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan rekan-rekan atas segala bentuk dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan selama proses ini berlangsung. Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan artikel ini di masa yang akan datang.

Referensi

- Agus, P. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018. *Jurnal Widya Iswara Indonesia*, 1(1), 20–36. <https://doi.org/10.56259/jwi.v1i1.3>

- Alfattah, D. A., Hudani, M. M., Purwaningsih, V. T., & Sobita, N. E. (2024). Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Pada Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 7(2), 124.
- Arispen, A., Dewi Rahmi, & Ade Yunita Mafruhat. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 75–81. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>
- Asawasakulkrai. (2022). Tax Revenue and Its Redistributive Effects on Inequality and Human Development. *Asian Administration and Management Review*, 5(2), 104–118.
- Astuti, S., & Mispiyanti, M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*, 384–397.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah Tahun 2023*. BPS Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/01/1457/indeks-pembangunan-manusia-ipm-jawa-tengah-2023-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/13/8f77e73a66a6f484c655985a/indeks-pembangunan-manusia-2023.html>
- Bediona, A. R. K., & Subarjo, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Upah Minimum. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11).
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Provinsi Jawa Tegah dalam Angka 2024* (33000.24005). <https://jateng.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/980d120f5be18d6400c48b16/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2024.html>
- Ezkirianto, R., & Alexandi, M. F. (2013). Analisis keterkaitan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14-29. <https://doi.org/10.29244/jekp.2.1.2013.14-29>
- Halim, A., & Rahayu, D. (2022). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kab/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia Tahun. 7(8).*
- Lin, S. A. (1994). Government spending and economic growth. *Applied Economics*, 26(1), 83-94.
- Loeis, A. A., & Setiawana, N. D. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2010-2020. *E-Jurnal EP Unud*, 11(2), 495–506.

- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Ningrum, E. W., & Nuryadin, M. R. (2021). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 113-126.
- Peacock, A., & Wiseman, J. (1961). *The growth of public expenditure in the United Kingdom*. Routledge.
- Prastiwi, S. A. T., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kab/kota Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(3), 135-147. <https://doi.org/10.14710/djoe.39681>
- Putra, I. G. E. (2024, March 15). *DAU yang Ditentukan Penggunaannya: Solusi untuk Pembangunan Daerah?* Kementrian Keuangan RI. <https://djpdb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4256-dau-yang-ditentukan-penggunaannya-solusi-untuk-pembangunan-daerah.html>
- Putro, T. S. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Darerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017 [Skripsi]*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rosmadayati, D., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(8), 1407–1423. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i8.284>
- Samudro, H. (2024). Regional Tax and Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1), 113–126.
- Saragih, A. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pembangunan Manusia. *Jurnal Economia*, 14(2), 197–211.
- Sari, Y., Murwati, A., & Sitorus, N. H. (2024). Analisis Teori Pertumbuhan Endogen pada Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera tahun 2020-2022. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 876-844.
- Sasongko, H., & Wibowo, P. (2022). Government Spending and Regional Economic Growth: The Mediating Effect of Human Development Index. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(2), 230–257. <http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v11i2.52229>
- Saswatata, S. S., & Parju, P. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Semarang. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 11(1), 17-28.
- Simarmata, Y. W., & Iskandar, D. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Two Stage Least Square Untuk Kasus Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 78-94. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.1.78-94>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *EKUTAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(3), 285–305. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478>
- Ummah, S. (2024). Analisis Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Periode Tahun 2020-2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 41-53. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.657>
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development*.
- Vijesandiran, S., & Selvarasa, P. (2018). Effects of Fiscal Policy on Human Development in Sri Lanka: an Empirical Analysis. *Journal of Smart Economic Growth*, 3(3), 1–36.
- Wahyuntari, L., & Pujiati, A. (2016). Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3), 296–305. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/edaj.v5i3.22153>
- Widowati, S. A., & Fatimah, A. N. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018). *Economic and Education Journal (Ecducation)*, 4(1), 71-82.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pada indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2044-2070.